

**LAPORAN KEGIATAN ANALISIS DATA
STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM),
REALISASI BELANJA MODAL
DAN ASET DESA
DI KABUPATEN GORONTALO**

OLEH

RIZKI SEPTIANSYAH

19880910 201402 1 002

PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO

BAB I

DATA UMUM OBYEK PENGAWASAN

A. Gambaran Umum Topik Pengawasan

Setiap tahun Pemerintah Pusat dan Daerah mengalokasikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan Pembangunan di Desa. Sejak dialokasikan pada 2015, anggaran Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang merupakan sumber utama Pendapatan pada APBDes, cenderung mengalami peningkatan.

Pada 2016 meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan 2015. Pada 2018, alokasi anggaran dana desa ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya. Peningkatan anggaran tersebut juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya.

Kementerian Desa juga telah menyusun Indeks Desa Membangun (IDM) untuk memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.

Pada Kabupaten Gorontalo sendiri, total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan sejak Tahun 2015 kepada 191 Pemerintah Desa di Kabupaten Gorontalo adalah sebesar Rp1.413.508.206.769,00. Jika diambil nilai rata-rata, setiap Pemerintah Desa telah memperoleh Anggaran sebesar 7,4 milyar rupiah. Namun demikian dari 191 desa yang ada, belum ada 1 desa pun yang berstatus Indeks Desa Membangun (IDM) Mandiri. Status IDM Desa dikategorikan sebagai berikut:

1. Sangat Tertinggal
2. Tertinggal
3. Berkembang
4. Maju
5. Mandiri

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa.

Informasi yang akan diperoleh terkait topik pengawasan ini antara lain:

- Gambaran Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Gorontalo;
- Rasio belanja modal terhadap APBDes
- Rasio Aset Desa terhadap Realisasi Belanja Modal;

B. Identitas Obyek Pengawasan

Analisis data dilakukan terhadap objek pengawasan yaitu pada 191 Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

C. Matriks Desain Pengawasan

Matriks Desain Pengawasan sebagai berikut

No	Informasi APP	Pertanyaan Audit	Kriteria Digunakan	Informasi Dibutuhkan dan Sumber	Metode/Teknik Pengumpulan Informasi	Metode Analisis Dipergunakan	Keterbatasan/Risiko	Antisipasi Risiko	Prakiraan Hasil	Penanggung Jawab	Waktu Selesai
1		2	3	4	5	6	7	8	9		
1	-	Bagaimana kondisi Status Indeks Desa Membangun (IDM) pada Desa di Kabupaten Gorontalo?	1. UU Desa 2. PP 43/2014 jo PP 47/2015 jo PP 11/2019 3. Permendagri 20/2018 ttg Pengelolaan keuangan desa 4. Permendagri 73/2020 ttg Pengawasan keuangan desa	Status IDM Desa	- Reviu dokumen - Wawancara - Observasi	Analisis Deskriptif	-	-	-	-	-
2	-	Apakah APBDes diprioritaskan untuk pembangunan Desa (Belanja Modal Desa)	1. UU Desa 2. PP 43/2014 jo PP 47/2015 jo PP 11/2019 3. Permendagri 20/2018 ttg Pengelolaan keuangan desa 4. Permendagri 73/2020 ttg Pengawasan keuangan desa	Realisasi Total Belanja Desa, Total Belanja Modal Desa	- Reviu dokumen - Wawancara - Observasi	Analisis Rasio Belanja Modal terhadap APBDes	Desa salah mengkategorikan belanja modal / belanja barang jasa	Melakukan konfirmasi kepada Perangkat Desa mengenai realisasi belanja	Rasio Belanja Modal terhadap APBDes kecil	-	-
3	-	Apakah Realisasi Belanja Modal telah diinventarisir sebagai aset desa	1. Permendagri 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa	Realisasi belanja modal desa, Nilai inventaris aset desa	- Reviu dokumen - Wawancara - Observasi	Analisis Rasio Aset Desa terhadap Belanja Modal Desa	Desa tidak melakukan inventaris aset secara akurat	Melakukan konfirmasi kepada Perangkat Desa mengenai daftar aset desa	Rasio Aset terhadap Belanja Modal kecil	-	-

BAB II KEGIATAN ANALISIS DATA

A. Kegiatan Analisis Data

Dilakukan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Status IDM Desa
2. Realisasi APBDes Tahun 2019 sampai dengan 2021
3. Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 sampai dengan 2021
4. Realisasi Total APBDes Tahun 2015-2021
5. Daftar Nilai Aset Desa Tahun 2015-2021

Data kemudian dikumpulkan dalam sebuah data set excel dan dilakukan analisis data sebagai berikut:

1. Gambaran Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Gorontalo melalui Analisis Deskriptif berdasarkan data sekunder Status IDM Desa
2. Analisis Rasio Belanja Modal terhadap APBDes
3. Analisis Rasio Aset Desa terhadap Realisasi Belanja

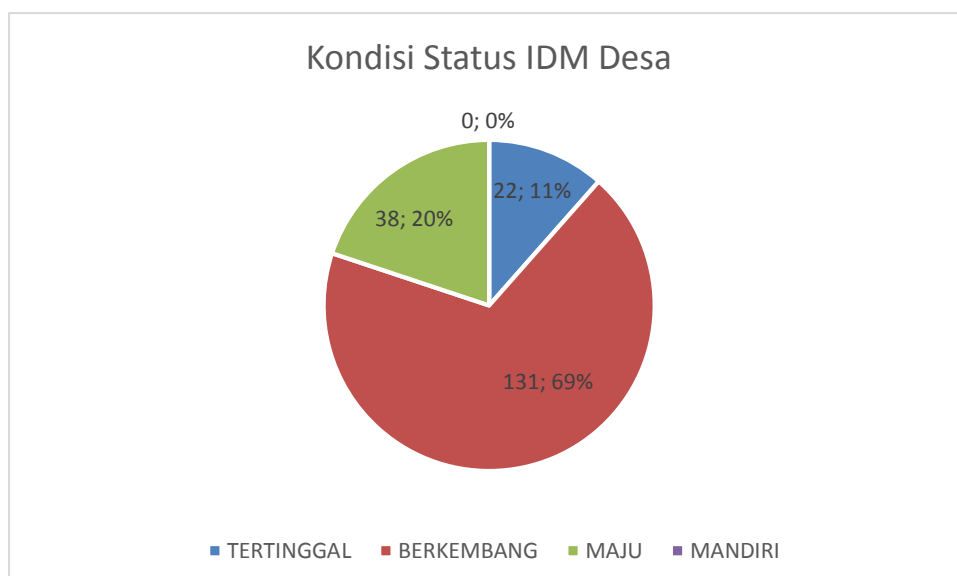
B. Uraian Analisis Data dan Hasilnya

Uraian Hasil Analisis Data sebagai berikut:

1. Gambaran Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Gorontalo dilakukan Analisis Deskriptif berdasarkan data sekunder Status IDM Desa

Pada Kabupaten Gorontalo, total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan sejak Tahun 2015 kepada 191 Pemerintah Desa di Kabupaten Gorontalo adalah sebesar Rp1.413.508.206.769,00. Jika diambil nilai rata-rata, setiap Pemerintah Desa telah memperoleh Anggaran sebesar 7,4 milyar rupiah. Namun demikian dari 191 desa yang ada, belum ada 1 desa pun yang berstatus Indeks Desa Membangun (IDM) Mandiri.

Kondisi Status IDM Desa di Kabupaten Gorontalo tergambar dalam Grafik berikut:



2. Analisis Rasio Belanja Modal Desa terhadap APBDes

Data yang di peroleh adalah Realisasi Belanja Modal dan APBDes Tahun 2019 sampai dengan 2021.

Dari Rp913.753.112.987,00 realisasi APBDes di Tahun 2019 sampai dengan 2021, sebesar Rp332.114.847.824,00 direalisasikan untuk Belanja Modal. Dapat disimpulkan, APBDes yang digunakan untuk belanja modal hanya sebesar 36,35% sedangkan sebanyak 63,65% digunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa.

3. Analisis Rasio Aset Desa terhadap Belanja Modal Desa

Data yang di peroleh adalah Total Nilai Aset Desa dan Belanja Modal Tahun 2019 sampai dengan 2021.

Dari Rp332.114.847.824,00 realisasi Belanja Modal di Tahun 2019 sampai dengan 2021, sebesar Rp106.354.201.052,00 telah terinventarisir sebagai Aset Desa. Dapat disimpulkan aset desa yang terinventarisir hanya sebesar 32,02%, sedangkan sisanya sebanyak 67,98% aset desa tidak terinventarisir.

Permasalahan yang umum terjadi diantaranya:

- a) Desa tidak Menyusun kertas kerja dan laporan hasil inventarisasi aset desa.
- b) Desa tidak Melakukan penatausahaan dan pencatatan kondisi aset desa.
- c) Desa tidak Melakukan pengamanan fisik atas aset-aset desa.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan Hasil Analisis Data pada BAB II, dapat disimpulkan Sebagian besar APBDes di Kabupaten Gorontalo tidak dipergunakan untuk menghasilkan Aset Desa yang produktif. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut apakah hal tersebut yang menyebabkan sebagian besar Desa masih berstatus “Berkembang” dan belum terdapat Desa “Mandiri” di Kabupaten Gorontalo.